KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR Segera Rampungkan RUU Perampasan Aset
Tanggal : Rabu, 17 Mei 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

DPR Segera Rampungkan RUU Perampasan Aset

Ketua DPR Puan Maharani memastikan beleid ini tidak menimbulkan kontroversi atau tumpang-tindih dengan undang-undang lainnya.

Fachri Audhia Hafiez
redaksi@mediaindonesia.com

DPR RI akan membuktikan keseriusan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana. Surat presiden (surpres) terkait dengan calon beleid tersebut sudah dikirimkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke DPR pada Jumat (5/5).

"Iya, secepatnya (dibahas) karena sudah terima surpresnya. Nanti akan kami bahas sesuai dengan mekanisme yang ada," kata Ketua DPR Puan Maharani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin, seusai rapat paripurna pembukaan masa persidangan V tahun sidang 2022-2023.

Puan mengungkap alasan RUU Perampasan Aset tidak dibacakan dalam rapat paripurna. Politikus PDIP itu mengatakan calon beleid itu belum masuk mekanisme pembahasan.

Meski begitu, Puan menyatakan RUU tersebut akan dibahas secepatnya sebab selain sudah tertunda cukup lama, komitmen pemerintah tidak boleh bertepuk sebelah tangan.

"Komitmennya kami akan selesaikan dengan sebaik-baiknya, bermanfaat, tidak kemudian ada menimbulkan kontroversi, dan tidak ada tumpang-tindih dengang UU lain," ucap Puan.

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto, atau Bambang Pacul, menjelaskan Badan Musyawarah (Bamus) akan menentukan mekanisme pembahasannya, termasuk melibatkan mitra DPR yang menyangkut RUU tersebut.

"Kalau dilihat dari mitranya, yang dari pemerintah hampir semuanya dari Komisi III, tetapi atas dasar aset, pengelolaan keuangan, itu menyangkut Kementerian Keuangan. Ini mitra yang di DPR ini mau ditanggapi pansusnya dari mana, itu dibahas dalam rapat Bamus. Nanti ditentukan mitra dengan siapa," kata Bambang.

Dalam rapat paripurna, Puan memberikan prioritas penyelesaian legislasi. Ada sembilan rancangan undang-undang yang saat ini berada pada pembicaraan tingkat pertama. Belum ada RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dalam daftar sembilan RUU tersebut.

Kekayaan tidak wajar

Dorongan pembahasan RUU Perampasan Aset semakin menguat di tengah pameran kekayaan tidak wajar sejumlah pejabat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil para pejabat yang diduga tidak jujur dalam menyusun laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Total, ada lima pemeriksaan aset pejabat yang kini diproses divisi penindakan lembaga antikorupsi itu. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan lima pejabat itu ialah mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, eks Kepala BPN Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra, mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono, dan Kepala Kantor Pajak Madya Wahono Saputro.

Rafael dan Andhi bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi. Pemanggilan pejabat untuk mengklarifikasi kekayaan pun masih berlanjut.

"Untuk hari ini, Selasa, 16 Mei 2023, KPK mengundang Kasubdit Penyidikan Ditjen Pajak dan Bupati Bolaang Mongondow Timur terkait dengan klarifikasi LHKPN," kata juru bicara bidang pencegahan KPK Ipi Maryati, kemarin.

Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim dan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lampung Reihana masuk antrean. Reihana bakal dipanggil untuk kedua kalinya. (Sru/Can/P-2)